

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan yang diproyeksikan dengan adanya tujuan tertentu yang memiliki unsur dan nilai dengan adanya praktek nyata disebut dengan kebijakan publik (Harold Laswell dan Abraham Kaplan, 2006). Penelitian David Easton dalam Nugroho (2009) menjelaskan dalam teorinya bahwa kebijakan publik merupakan aktifitas yang dilaksanakan oleh suatu pemerintahan penjelasan tersebut menggambarkan bahwa konsep pemerintahan merupakan gambaran suatu kebijakan yang memiliki tujuan dan dampak terhadap masyarakat. Dampak positif bisa terjadi ketika adanya kebijakan yang dijalankan sesuai dengan rencana yang sudah diatur didalam kebijakan, sedangkan dampak negatif terjadi tergantung dengan suksesnya sistem tersebut. Pengertian yang dijelaskan tersebut memiliki keterkaitan dengan masalah yang akan dibahas dan perlu dikaji dalam pembuat kebijakan. Pembuat kebijakan yang dimaksud penulis dalam hal ini adalah pemerintah, karena suksesnya suatu program dapat dievaluasi dari kebijakan yang berkaitan dengan dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Masalah akan timbul dalam pemerintahan dan masyarakat apabila kepentingan publik tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah, karena pada dasarnya pemerintah sebagai suatu lembaga yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan masalah yang ada dimasyarakat.

Program Gerakan “Bela-Beli kulon Progo” menurut (Asshofi, 2016) dapat dimaknai sebagai kebijakan untuk mengajak masyarakat membangun perekonomian Kulon Progo dengan mengutamakan produk sendiri dibandingkan produk asing. (Aryatiningsih, 2017) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa program Bela-Beli di Kulon Progo dideklarasikan sesuai dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 25 Maret 2013 yang dihadiri oleh seluruh elemen masyarakat Kulon Progo yang bertempat di Alun-Alun Wates, Bupati Kulon Progo mengumumkan dan memperkenalkan produk khas daerah

diantaranya ada batu andesit, beras sehat, gula semut, Airku dan yang paling membanggakan lagi adalah motif batik daerah yang diberi nama Gebleg Renteng, selain itu Bupati Kulon Progo terlebih dahulu menghimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk diwajibkan pada hari Kamis mengenakan Batik Gebleg Renteng dan membeli beras sehat minimal 10 kg tiap bulannya.

Program gerakan Bela Beli ini dalam pelaksanaannya melibatkan beberapa *stakeholder* seperti, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulonprogo, masyarakat Kecamatan Kalibawang, dan TOMIRA (Toko Milik Rakyat). Dinas Koperasi dan UMKM dalam pelaksanaannya berfungsi untuk melaksanakan dan membina tugas bidang Koperasi, UMKM, dan Perindustrian. Masyarakat Kecamatan Kalibawang sebagai pelaku utama dalam pengembangan perekonomian diwilayah Kecamatan Kalibawang dalam program Bela-Beli. TOMIRA sebagai mitra pemasaran produk olahan masyarakat Kecamatan Kalibawang.

Program Bela Beli sendiri telah berlangsung enam tahun sejak pertama dideklarasikan. Pelaksanaannya selama enam tahun program gerakan Bela-Beli sedikit banyak telah memberikan dampak ekonomi pada masyarakat Kulon Progo. Selain itu, dalam pelaksanaannya program gerakan Bela-Beli banyak memunculkan tanda tanya seperti, apakah benar Bela-Beli hadir sebagai solusi dalam kondisi perekonomian Kabupaten Kulon Progo yang kurang baik dibanding kabupaten lain di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), benarkah program gerakan Bela-beli merupakan manifestasi prinsip *Collaborative Governance* yang diinisiasikan oleh Pemkab Kulon Progo dengan harapan dapat menjadi solusi penanggulangan kemiskinan, dan tercapainya kesejahteraan masyarakat, atukah hanya sekedar gimmick untuk menaikkan eksistensi Kabupaten Kulon Progo.

Kulon Progo merupakan kabupaten dengan tingkat kesejahteraan masyarakat peringkat kedua terendah di Provinsi DIY. Fakta tersebut didukung dengan temuan data lapangan tentang pencapaian indeks pembangunan terendah dengan prafelensi 75,95% pada

tahun 2013 (BPS DIY,2014). Ironisnya, dengan kondisi IPM yang cukup rendah Kabupaten Kulonprogo memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan seperti, sumber daya alam yang cukup melimpah terutama dalam sektor pertanian yang dapat mendongkrak kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Ketidakberhasilan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo belum mampu menekan kemiskinan masyarakat Kulon Progo, sehingga masih tingginya data tingkat kemiskinan. Ketidakberhasilan mengentaskan kemiskinan dalam beberapa tahun belakangan ini menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan suatu masalah yang kompleks dan harus ditangani dengan maksimal.

Salah satu kecamatan yang turut berpartisipasi dalam pelaksanaan Program Bela-Beli Kabupaten Kulonprogo adalah Kecamatan Kalibawang, yang merupakan salah satu kecamatan dengan kategori miskin di Kabupaten Kulonprogo (BPS Kulon Progo, 2014: 82). Kondisi tersebut dapat dirubah dengan pemanfaatan sumber daya alam setempat, berupa produk unggulan gula merah hasil olahan dari buah kelapa yang disebut dengan “Gula Semut”. Berdasarkan studi terdahulu pelaksanaan Program Bela-Beli di Kecamatan Kalibawang terdapat beberapa hambatan seperti, sikap perilaku masyarakatnya yang praktis dan boros serta, perbedaan konsep kesejahteraan menurut masyarakat dan pemerintah.

Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana proses Collaborative Governance berjalan pada Program Bela-Beli selama enam tahun telah terlaksana ini dapat menjadi langkah konkret Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam penanggulangan kemiskinan yang kolaboratif. Permasalahan yang dijelaskan dalam pendahuluan diatas menarik untuk dilakukan penelitian sehingga penulis mengambil judul “Analisa Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Collaborative Governance (Studi Pada Pelaksanaan Program Gerakan Bela Beli di Kecamatan Kalibawang)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan oleh penulis maka dapat ditarik satu

rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana proses *collaborative governance* pada pelaksanaan program Bela-Beli di Kecamatan Kalibawang ?
2. Siapa saja stakeholders yang terlibat dalam program Bela-Beli di Kecamatan Kalibawang ?

1.3 Manfaat

a. Teoritis

- Menambah sumber pengetahuan mengenai program bela beli di Kecamatan Kalibawang
- Sumber informasi bagi penelitian sejenis pada masa yang akan datang
- Refrensi pengembangan konsep *collaborative governance*

b. Praktis

- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana proses *collaborative governance* pada pelaksanaan program Bela-Beli di Kecamatan Kalibawang

1.5 Studi Terdahulu

(Felix Arberd Nur Kristianto, 2015) mengatakan dalam penelitiannya berjudul Partisipasi Masyarakat Kecamatan Kalibawang dalam gerakan “Bela-Beli Kulon Progo”. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi masyarakat Kecamatan Kalibawang belum optimal yang dapat dilihat dari 3 indikator yaitu kesempatan partisipasi, kemampuan

partisipasi, dan kemauan partisipasi. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kalibawang, Kulonprogo.

(Pribadi & Sambodo, 2016) Melakukan penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Collaborative Governance di Desa Budaya Brosot, Galur, Kulonprogo, DI. Yogyakarta” dengan hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan Collaborative Governance di Desa Budaya Brosot dipengaruhi oleh Starting Condition, Institutional Design, dan Facilitative Leadership. Hal ini sebagaimana model yang ditulis oleh Ansell dan Gash (2007). Namun pada pelaksanaan Collaborative Governance di Desa Budaya Brosot faktor Starting Condition, Institutional Design, dan Facilitative Leadership serta Collaborative Process, juga dipengaruhi oleh faktor budaya Faktor faktor budaya itu antara lain hubungan kekerabatan yang baik menjadikan Desa Budaya Brosot tidak pernah mempunyai riwayat konflik yang menonjol dan malahan mempunyai riwayat kerjasama yang baik. Hal ini berpengaruh pada *starting condition* dan *collaborative process*.

(Sinta Nurfitriyani, 2018), melakukan penelitian berjudul Implementasi Program “Gerakan Bela Beli Kulon Progo” Di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program-program Gerakan Bela-Beli Kulon Progo berjalan dengan cukup baik dan lancar akan tetapi masih ada beberapa faktor yang belum maksimal. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penelitian ini dari teori Van Meter dan Van Horn yaitu faktor standar dan tujuan, faktor sumberdaya yang meliputi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya ekonomi, serta sumberdaya material, kemudian faktor karakteristik agen pelaksana, faktor komunikasi antar organisasi, faktor kondisi social ekonomi dan politik, serta faktor disposisi implementor.

(Nahiyatuzahra, 2018), Melakukan penelitian berjudul Analisis Eksternalitas Usaha Batik di Desa Gulurejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta Hasil penelitian ini adalah ada eksternalitas positif dan eksternalitas negatif dari usaha batik di Desa Gulurejo. Eksternalitas positifnya berupa a) menimbulkan berbagai jenis lapangan pekerjaan, b) mengurangi jumlah pengangguran, c) meningkatkan pendapatan keluarga. Eksternalitas negatifnya berupa a) pencemaran air dan udara akibat limbah batik, b) konflik sosial akibat protes masyarakat terdampak limbah batik, c) dampak kesehatan yang terjadi akibat pencemaran limbah batik. Serta terdapat efek pengganda (multiplier effect) pada dampak ekonomi yang cukup besar bernilai 1,39 persen.

(Yuni Catur Wulan, 2019), melakukan penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kelurahan Pakistaji Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, Jawa Timur. Hasil penelitian ini adalah terciptanya kebijakan program KUBE di kota Probolinggo yang merupakan suatu bentuk usaha pemerintah dalam meminimalisir kemiskinan di Kota Probolinggo. KUBE memiliki peranan yang sangat strategis, yakni sebagai penggerak sekaligus sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Probolinggo.

(P.Eko Prasetyo, 2016) menjelaskan dalam penelitiannya yang berjudul Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran dengan menggunakan peran UMKM. Hasil penelitian ini adalah UMKM dalam peranannya dapat menjadi salah satu program untuk menanggulangi kemiskinan dan mengurangi pengangguran, akan tetapi UMKM juga memiliki masalah yang menjadi kendala untuk terbentuknya UMKM

adalah pasar modal. Sehingga melihat kenyataan yang terjadi dilapangan, masalah ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memberdayakan UMKM melalui bantuan modal usaha.

(Indah Purnama Sari, 2020), menjelaskan dalam penelitiannya yang berjudul Pengentasan Kemiskinan di Jawa Timur dengan Pendekatan Pembangunan Manusia. Hasil penelitian ini adalah penapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial IPM yaitu umur panjang, hidup sehat, dan pengetahuan standar hidup yang layak. Penelitian ini juga menjelaskan indeks pembangunan manusia terbukti berpengaruh signifikan terhadap pemberantasan kemiskinan di Jawa Timur.

(Abdul Fatah Fanani,2012), melakukan penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat. Hasil penelitian ini adalah adanya faktor penghambat dalam pelaksanaan PNPM mandiri, yang terdiri dari faktor internal dan eksternal. Salah satu penghambatnya adalah masih adanya sikap dan perilaku warga masyarakat yang memprovokasi untuk tidak mendukung kegiatan tersebut.

(Akhmadi,2015), menjelaskan dalam penelitiannya yang berjudul Pengembangan Agribisnis Sebagai Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Perdesaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memformulasikan strategi terbaik penanggulangan kemiskinan di perdesaan. Hasil penelitian ini adalah strategi penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan petani melalui program pendidikan khusus pengembangan manajemen agribisnis bagi petani adalah strategi yang terbaik.

(Wahyu Dewi Kesuma,2017) menjelaskan dalam penelitiannya yang berjudul Manajemen Strategi Program Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (Gerak)

Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Trenggalek. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Trenggalek melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerahnya berusaha keras memaksimalkan kekuatan yang dimiliki berupa struktur kelembagaan, SDM yang berkompeten, komitmen petugas, dan memperbesar peluang yang ada yaitu menjadikan Program GERTAK sebagai program percontohan baik Nasional maupun internasional.

(Edy Sudrajad Gunantoro,2016) menjelaskan dalam penelitiannya yang berjudul Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dengan studi kasus program PNPM-MP di Kelurahan Kabupaten Sragen. Hasil penelitian ini menunjukkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam program PNPM-MP di Kelurahan Sragen Wetan dan Desa Karangudi berjalan cukup efektif walaupun penurunan angka kemiskinan lambat.

1.6 Kerangka Teori Dasar

1.6.1 Kebijakan

a) Definisi kebijakan

Program dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan dan organisasi). Program yang dimaksud sebagai acuan untuk mencapai sasaran dan garis haluan yang sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Menurut Indriyawan kebijakan adalah suatu proses untuk membuat pekerjaan menjadi lebih sederhana dan disusun teratur. Dengan

demikian, proses bisa memudahkan manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya (Amin, 2017).

Sedangkan Farida Yusuf Tayibnabis mengartikan kebijakan sebagai segala sesuatu yang dilakukan seseorang yang nantinya akan mendatangkan hasil atau pengaruh (Eko & Widoyoko, 2009). Kumpulan dari beberapa harapan yang saling terkait dan bergantung satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan yang sama disebut kebijakan. Program biasanya mencakup seluruh elemen kegiatan yang berada dalam unit yang sama untuk saling melengkapi sehingga harus dilaksanakan secara berurutan. Kebijakan sering diartikan dengan suatu perencanaan yang kokoh dengan adanya persiapan yang sudah dirancang, sehingga suatu kebijakan dapat disebutkan juga sebagai suatu program pembelajaran bagi pemerintah dan masyarakat setempat (Mudasir, 2012).

1.6.2 Kemiskinan

a) Definisi kemiskinan

Kemiskinan merupakan fenomena yang cukup mudah ditemui di Indonesia, dan disebabkan oleh banyak faktor baik eksternal maupun internal. Kemiskinan memiliki penjelasan yang sangat luas untuk mengukurnya, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kondisi yang tidak mencukupi kehidupan seseorang untuk melengkapi kehidupannya, baik berupa pendapatan sehari-hari, kebutuhan dasar, tidak mampu meningkatkan tingkat ekonomi, tidak mampu ikut berpartisipasi dalam kehidupan sosial pada umumnya, minimnya pendidikan, rendahnya kemampuan untuk bersaing. Kemiskinan merupakan masalah yang sering muncul di semua aspek karena sangat berkaitan dengan serangkaian aspek sosial, ekonomi, kesehatan, budaya, pendidikan. Kemiskinan menjadi masalah fenomenal dalam sebuah negara karena pemerintah

disuatu negara tersebut harus mampu memberikan solusi untuk mengurangi tingkat kemiskinan bagi negaranya.

Menurut (Puti Andini, 2018) dalam penelitiannya menjelaskan kemiskinan dikaitkan dengan perhitungan tingkat pendapatan serta kebutuhan pokok yang mendasar yang dapat dipenuhi seseorang untuk bertahan hidup dengan baik. Selanjutnya, dijelaskan pula bahwa kemiskinan dilihat dari perbandingan pendapatan seseorang untuk melengkapi kehidupan dasarnya berupa sandang, pangan dan papan. Kemiskinan merupakan suatu keadaan yang berkaitan dengan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling mendasar yang berkaitan dengan konsumsi dan pendapatan (Elvira Handayani 2018).

Kemiskinan dapat dijadikan tolak ukur bahwa masih adanya ketidakmerataan antar kelompok masyarakat untuk memenuhi kehidupannya. Kemiskinan juga berpengaruh pada aktifnya masyarakat dalam berpartisipasi terhadap pengambilan keputusan “tidak adanya partisipasi dalam pengambilan keputusan publik”(Indah Purnama Sari, 2020). Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan.

a) Kriteria Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu masalah yang melibatkan lintas sektor yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan, kemiskinan bisa dilihat dari faktor pendidikan, tingkat pendapatan kesehatan, akses terhadap barang dan jasa, dan kondisi lingkungan. Penentuan kriteria kemiskinan dapat ditentukan dengan permasalahan yang dialami suatu keluarga yang rumit, karena banyaknya kriteria yang harus dipenuhi untuk menentukan sebuah keluarga miskin dan layak menerima bantuan penanganan kemiskinan.

Pemberian program pengentasan kemiskinan yang selama ini diberikan oleh pemerintah seharusnya memberikan perubahan yang cukup signifikan dengan semakin berkurangnya jumlah penduduk miskin. Perlu adanya system identifikasi pemberian bantuan kemiskinan yang tepat bagi warga miskin berdasarkan parameter yang ada sehingga dapat memberikan percepatan.pengentasan kemiskinan. Pijakan lain yang digunakanya itu lingkungan strategis berupa revolusi teknologi telekomunikasi yang melahirkan bentuk system informasi geografis berbasis web interaktif dan dinamis. Pengentasan kemiskinan memerlukan perhatian khusus terutama pada ketepatan sasaran bantuan yang akan disalurkan. Ketepatan sasaran berhubungan erat dengan distribusi keluarga miskin pada suatu wilayah calon target bantuan.

b) Faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan disertai pemerataan hasil pertumbuhan keseluruhan sektor usaha sangat dibutuhkan dalam upaya menurunnya tingkat kemiskinan. Untuk mempercepat penurunan tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan melalui peningkatan pendapatan rumah tangga. Faktor lain yang mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah upah. Upah minimum ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layak yang dibutuhkan pekerja dengan harapan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja sehingga tingkat kemiskinan akan berkurang.

c) Dampak kemiskinan

Banyak dampak yang terjadi yang disebabkan kemiskinan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pengangguran merupakan dampak kemiskinan, berhubung pendidikan dan keterampilan merupakan hal yang sulit diraih masyarakat. Maka masyarakat

sulit untuk berkembang dan mencari pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan, dikarenakan sulit untuk bekerja.

- b. Tingkat kematian meningkat, masyarakat Indonesia banyak mengalami kematian karena kelaparan atau melakukan tindakan bunuh diri karena tidak kuat dalam menjalani kemiskinan yang alami.
- c. Putus sekolah Tidak bersekolah (tingkat pendidikan yang rendah) ini membuat rakyat Indonesia tidak mempunyai ilmu yang cukup untuk memperoleh pendapatan. Biaya pendidikan penyebab rakyat miskin putus sekolah karena tidak lagi mampu membiayai sekolah, putus sekolah dan hilangnya kesempatan pendidikan akan menjadi penghambat rakyat miskin dalam menambah keterampilan, menjangkau cita-cita mimpi mereka. Ini menyebabkan kemiskinan yang dalam karena hilangnya kesempatan untuk bersaing dengan global dan hilangnya kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak. Buruknya generasi penerus adalah dampak yang berbahaya akibat kemiskinan. Jika anak-anak putus sekolah dan berkerja karena terpaksa, maka akan ada gangguan pada anak-anak itu sendiri seperti gangguan pada perkembangan mental dan fisik dan cara berfikir mereka. Contoh anak-anak jalanan yang tak mempunyai tempat tinggal, tidur di jalanan, tidak sekolah, mengamen untuk mencari makan dan lainnya. Generasi penerus merupakan dampak panjang dan buruk karena anak-anak seharusnya mendapatkan hak mereka untuk bahagia, mendapatkan pendidikan, mendapatkan nutrisi baik. Ini dapat menyebabkan mereka terjebak dalam kesulitan hingga dewasa dan dampak pada generasi penerus.

- d. Tingkat kejahatan meningkat, masyarakat Indonesia jadi terdesak untuk memperoleh pendapatan dengan cara kejahatan karena dengan cara yang baik mereka tidak mempunyai modal yaitu ilmu dan keterampilan yang cukup.

1.6.3 Collaborative Governance

a) Definisi *Collaborative Governance*

Collaborative Governance merupakan suatu istilah yang tidak asing dalam tata kelola pemerintahan, bahkan sering digunakan untuk menjelaskan fenomena yang ada dalam tataran masyarakat. *Collaborative Governance* menurut (Zuhriyati, 2019) dapat dimaknai sebagai kerjasama antara publik dan privat yang berkepentingan aktifitas yang dilakukan individu atau kelompok organisasi yang mempunyai tugas dan wewenang atau fungsi tertentu yang diakui keberadaannya dalam kelompok sosial demi tercapainya tujuan yang di tentukan. Sedangkan, penelitian (Sambodo & Pribadi, 2016) menjelaskan definisi *Collaborative Governance* dalam pemerintahan dapat melibatkan organisasi non pemerintah dalam proses pengambilan keputusan.

Tujuan dari melibatkan organisasi non pemerintah adalah meminimalisir dampak negatif yang ada dipemerintahan dan meningkatkan kerja sama antara instansi pemerintahan, masyarakat, dan non pemerintahan, sehingga dapat terwujudnya kebijakan yang inovatif diprogram publik, serta asset public.

Menurut penelitian (Ranggi Ade Febrian, 2016) *Collaborative Governance* merupakan suatu proses untuk melibatkan berbagai aspek yang mengusung kepentingan suatu instansi dalam mencapai tujuan bersama. *Collaborative Governance* merupakan sebuah upaa utuk meningkatkan pengaturan lembaga publik yang terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan. Menurut penelitian (Chema, 2016) *Collaborative Governance* merupakan suatu sistem nilai

yang berkaitan dengan kebijakan yang memuat unsur ekonomi, sosial, politik untuk dikelola oleh segala sektor, masyarakat, pemerintah, maupun sektor swasta. Secara khusus *Collaborative Governance* diperlukan untuk membrikan givernance menjadi lebih efektif dan menjadi terstruktur seingga lebih efektif untuk memenuhi peningkatan permintaan yang dapat timbul dalam pengelolaan lingkungan pemerintahan, organisasi terkait, dan batas sektoral.

Collaborative Governance dapat dimaknai sebagai upaya kerjasama beberapa pihak yang memiliki kepentingan seperti, pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, dengan kejelasan tanggung jawab dan pembagian peran untuk mengelola sesuatu demi tercapainya kesejahteraan bersama. *Collaborative Governance* muncul sebagai respon atas kegagalan implementasi dan tingginya biaya dalam adanya politisasi terhdap regulasi.

b) Kriteria *Collaborative Governance*

Teori Goldsmith dan Kettl menjelaskan kriteria keberhasilan *Collaborative Governance*:

- a. Networked structure merupakan suatu rangkaian yang memiliki keterikatan antara satu dan lainnya yang menggambarkan unsur fisik yang ditangani. *Collaborative Governance* merupakan unsur jaringan yang tidak boleh trebentuk adanya suatu kekuasaan dari salah satu pihak.
- b. Commitment to a common purpose memiliki tujuan yang dilakukan secara bersama-sama, tujuan ini biasanya terdapat pada misi umum suatu organisasi pemerintahan. Komitmen yang terjalin tidak memihak salah satu pemangku kebijakan. Komitmen yang diwujudkan dalam *Collaborative Governance* harus terwujud sebagai wujud dari profesional yang dibangun untuk keberhasilan pelaksanaan pemerintahana.

- c. Trust among the participants, merupakan hubungan sosial yang berkeyakinan bahwa para partisipasi pemerintahan mempercayakan seluruh informasi dalam suatu jaringan untuk mencapai tujuan dan harapan bersama.
- d. Acces to authority merupakan ketersediaan ukuran-ukuran atau ketentuan prosedur yang sudah jelas. Pemerintah memberikan aturan dan kewenangan yang jelas dan diterima oleh masing-masing *stakeholder* untuk menjalankan peran masing-masing.
- e. Distributive accountability/ responsibility merupakan pengelolaan bersama-sama dengan berbagai pembuat keputusan kepada seluruh anggota jaringan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam *Collaborative Governance* masing-masing stakeholder harus terlibat dalam pembuatan keputusan.
- f. Information sharing merupakan perlindungan dan pembatasan pada akses bagi yang bukan anggota selama bisa diterima oleh semua pihak, sehingga dalam pemerintahan *Collaborative Governance* harus ada pembagian informasi yang jelas, dan kemudahan akses bisa didapat bagi masing-masing *stakeholder*.
- g. Access to resources merupakan kesediaan sumber keuangan yang memiliki teknis dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai ketersediaan sumber daya bagi masing-masing pihak yang terlibat.

1.7 Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik suatu masalah yang menjadi fokus perhatian. Sehingga bertujuan membatasi suatu pengertian yang nantinya akan memudahkan dalam menjalankan penelitian di lapangan.

Banyak teori yang ada dalam penelitian ini, maka penulis menentukan beberapa definisi konseptual yang berhubungan dengan yang akan diteliti, antara lain:

1.7.1 Analisa

Menurut Komarudin analisa adalah aktivitas berfikir untuk menguraikan keseluruhan komponen menjadi sebuah komponen yang kecil sehingga dapat mengenal tanda-tanda, hubungan, fungsi setiap komponen dalam bentuk pesan yang disampaikan. Analisa sendiri dapat berupa dampak dari pelaksanaan program tersebut, apakah mencapai tujuan awal, keuntungan yang akan diterima oleh pelaksana kebijakan dari program serta analisa biaya dari program itu sendiri. Analisa dalam hal ini digunakan untuk menilai proses untuk kemajuan dan perbaikan hasil program bela beli Kulonprogo di Kecamatan Kalibawang.

1.7.2 Implementasi

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya (Mulyadi, 2015).

1.7.3 Program

Program adalah sebuah kebijakan yang telah dibuat dengan tujuan untuk memudahkan seseorang dalam melakukan pekerjaannya, sehingga hal ini akan membawakan dampak ataupun pengaruh positif bagi setiap orang yang melaksanakannya. Kebijakan yang dibuat tidak hanya satu kali tetapi berkesinambungan.

1.8 Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan petunjuk untuk mengukur suatu variabel. Dalam penelitian ini menggunakan kriteria keberhasilan dalam *collaborative governance*, yaitu: *Networked Structure, Commitment to a Common Purpose, Trust Among The Participants, Governance, Access to Authority, Distributive Accountability / Responsibility, Information Sharing, Access to Resources*. (Goldsmith dan Donald, 2009:135-136).

- a) *Networked Structure*, adalah suatu hubungan yang berkaitan antara salah satu elemen dengan elemen lain secara bersama-sama menggambarkan unsur fisik dan jaringan yang diselesaikan. Selanjutnya, dalam *collaborative governance* unsur jaringan tidak boleh berbentuk hirarki yakni adanya kekuasaan dari salah satu pihak. *Collaborative governance*, harus bersifat berkaitan dengan struktur jaringan yang terlibat yakni, tidak ada struktur kekuasaan, yang mendominasi.
- b) *Commitment to a Common Purpose*, menjelaskan mengapa sebuah jaringan harus ada karena untuk mencapai sebuah *collaborative governance* yang baik dilakukan secara bersama-sama. Tujuan ini didapat pada misi suatu organisasi pemerintahan sehingga menghasilkan komitmen yang baik untuk menjalin *collaborative governance* yang tidak memihak pemangku kepentingan kebijakan tertentu.
- c) *Trust Among The Participants*, adalah hubungan profesional yang mempercayakan pada informasi-informasi dari *stakeholders* untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga, setiap *stakeholders* harus saling percaya untuk mewujudkan hubungan yang profesional untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan *collaborative governance*.
- d) *Access to Authority*, adalah ketersediaan ukuran-ukuran atau ketentuan prosedur-prosedur yang jelas dan diterima secara luas. Jadi, sudah ada aturan kewenangan yang jelas dan diterima oleh masing-masing *stakeholders* untuk menjalankan peran sesuai kewenangannya.

- e) *Distributive Accountability / Responsibility*, adalah suatu pemetaan, dan pengelolaan manajemenbersama-sama dengan stakeholders dan berbagi sejumlah pembuatan keputusan kepada seluruh anggota jaringan serta berbagi tanggung jawab untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- f) *Information Sharing*, adalah suatu kemudahan akses bagi para anggota, perlindungan privacy, dan keterbatasan akses bagi yang bukan anggota selama bisa diterima oleh semua pihak. Sehingga dalam pemerintahan kolaboratif harus ada pembagian informasi yang jelas, dan kemudahan akses informasi bisa di dapat bagi masing-masing stakeholders.
- g) *Access to Resources*, adalah tersedianya sumber dana, tatanan teknis, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya yang diperluka untuk mrncapai suatu tujuan *collaborative governance*. Harus adanya kejelasan dan ketersediaan sumber daya disetiap *stakeholder* yang terlibat didalam *collaborative governance*.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian yang menggambarkan suatu peristiwa untuk diambil kesimpulan secara umum. Tujuan penelitian deskriptif kualitatif adalah memfokuskan diri pada pemecah permasalahan yang sesuai dengan situasi subtansial yang dihadapi, untuk itu perlu data yang akurat dan harus dikumpulkan dianalisa secara sistematis demi ketetapan dalam pengkajiannya (Hadari, 2005).

Menurut Whitney dalam Moh. Nazir bahwa metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif memahami masalah-

masalah yang ada dimasyarakat, kemudian tata cara yang berlaku dalam masyarakat di situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses yang sedang terjadi dan pengaruh dari suatu fenomena (Nazir, 2003).

1.9.2 Data dan Sumber Data

a) Data Primer

Data primer menurut Arikunto adalah data berbentuk verbal yaitu kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan narasumber dapat dipercaya, yakni informasi yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang didapatkan dari responden secara langsung (Arikunto,2010). Data primer ini akan diperoleh dari hasil wawancara dan observasi di Dinas perdagangan dan perindustrian Kabupaten Kulonprogo dan stakeholder yang terlibat untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam pengumpulan data. Ini sesuai dengan pendapat Lofland yang mengatakan bahwa sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan (Arikunto, 2010).

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang didapatkan peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder berupa bukti, catatan, ataupun laporan historis yang telah disusun dalam data dokumenter yang dipublikasi dan yang tidak dipublikasikan (Supomo,2014). Data sekunder menurut Arikunto adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh penluis serta studi pustaka. Dapat dikatakan data sekunder ini bisa berasal dari dokumen-dokumen grafis, seperti tabel, catatan, SMS, foto dan lain sebagainya (Arikunto, 2010). Dalam

penelitian ini penulis juga menggunakan data sekunder yang didapatkan dari jurnal, buku, survey literatur, berita, dan lain sebagainya yang bersifat laporan atau cerita orang lain.

1.9.3 Unit Analisis

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan data sekunder yang didapatkan dari jurnal, buku, survey literatur, berita, dan lain sebagainya yang bersifat laporan atau cerita orang lain (Imam Suprayogo, 2001). Sedangkan menurut Krippendorff unit analisis merupakan bagian yang dicatat kemudian memisahkan dengan batasannya dan mengidentifikasi untuk dianalisis (Erianto, 2013). Penelitian ini berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui sejauh mana program Bela Beli Kulonprogo dengan menggunakan kriteria evaluasi. Maka unit analisis pada penelitian ini adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian, UMKM, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kulonprogo.

1.9.4 Lingkup Penelitian

Dalam Penelitian ini peneliti melakukan penelitian di Kecamatan Kalibawang, karena dalam pelaksanaannya masih diperlukan persiapan dan evaluasi yang harus disiapkan pemerintah.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Setelah peneliti mendapatkan data dan informasi dari obyek yang diteliti, langkah selanjutnya adalah menyajikan secara utuh tanpa melakukan tambahan maupun pengurangan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan obyek penelitian. Teknik pengumpulan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi Pustaka

Menurut Sugiyono, studi pustaka berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi pustaka sangat penting dalam penelitian, karena penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah. Dalam penelitian ini peneliti dalam studi pustaka membaca dari buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan kebijakan jual beli.

b. Wawancara

Menurut Sugiyono wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Peneliti melakukan tanya jawab dengan narasumber yang mengetahui perkembangan dari kebijakan Bela Beli di Kabupaten Kulonporgo.

c. *Internet seaching*

Internet seaching adalah teknik pengumpulan data melalui bantuan teknologi digital dimana internet tersebut dapat menampilkan segala bentuk informasi dari berbagai era dan berbagai belahan negara didalamnya. Sehingga pengumpulan data melalui teknik ini akan memudahkan peneliti untuk mencari data dengan cepat, lengkap, dan ketersediaan data dari berbagai tahun. Mencari data di internet dapat berupa *searching, brwosing, surfing atau downloading*.

d. Observasi

Teknik Observasi menurut Narawi dan Martini adalah pengamatan dan catatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada obyek penelitian. Adanya observasi peneliti dapat mengetahui sejauh

mana perkembangan Bela Beli Kabupaten Kulon Progo. Kesimpulan dari observasi adalah kegiatan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan oleh peneliti guna melengkapi penelitian agar mencapai hasil yang maksimal.

e. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah mencari data tentang hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan lain sebagainya. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan program Bela Beli yang ada di Kabupaten Kulonprogo yang dimulai dari sejak kapan menggunakan program bela beli, bagaimana sarana dan prasarana dalam mengembangkan bela beli, Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu mengolah dan menggunakan sistem semi-online. Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, pihak swasta yang akan menjadi narasumber.

1.9.6 Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Teknik analisa data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari kemudian membuat kesimpulan. Kemudian dalam penelitian ini menggunakan analisa data menurut Miles dan Huberman, yang terdiri dari:

1. Pengumpulan data (*Data Collection*)

Yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi

pengumpulan data yang dianggap tepat dan digunakan sebagai penentu fokus serta peendalaman data dalam proses pengumpulan data berikutnya.

2. Reduksi data (*Data Reduction*)

Sebagai proses seleksi, memilah untuk memfokuskan pada suatu tujuan, pemindahan data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan padasaat pengumpulan data, dengan kemudian reduksi data dapat dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Melakukan interpretasi data dari informan terhadap masalah yang diteliti. Penyajian data diperoleh dari berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel. Bentuk penyajian data dala penelitian kualitatif yang paling sering adalah berbentuk teks naratif dan peristiwa yang terjadi di masa lampau.

4. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing/verification*)

Disini peneliti membuat kesimpulan berdasarkan narasi yang telah disusun pada tahap ketiga, sehingga peneliti mampu untuk memberikan jawaban atas permasalahan penelitian. Namun dalam penelitian kualitatif ini juga masih dapat mengalami perubahan karena mungkin penelitian ini mampu merumuskan permasalahan tetapi mungkin juga tidak. Penelitian ini masih bersifat sementara, karena karakteristik dari penelitian kualitatif menggunakan rancangan penelitian bersifat sementara dan akan berkembang jika penelitian berada dilapangan.